

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN MALPRAKTEK DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Notaris merupakan Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam membuat akta Otentik. Atas dasar tersebut maka diperlukan suatu perlindungan Hukum bagi Notaris apabila dalam melaksanakan tugas jabatannya diduga melakukan malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN-P), tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan bentuk perlindungan Hukum yang diberikan MKN kepada Notaris. Sehingga menimbulkan permasalahan hukum yaitu bagaimana perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris yang diduga melakukan malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik dan bagaimana Prosedur hukum bagi perlindungan hukumnya bagi Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan pada masa Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris pada masa UUJN No 30 tahun 2004 bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan MPD berwenang untuk mengambil fotocopy Minuta akta dan atau protokol Notaris yang disimpan dalam penyimpanan Notaris, sedangkan Undang-undang No 2 tahun 2014 (UUJN-P) untuk proses peradilan penyidik, penuntut umum dan hakim harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan untuk Prosedur Hukum bagi perlindungan Hukumnya terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh penyidik dan Majelis Kehormatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan Hukum yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) UUJN-P. Hal ini dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Dugaan Malpraktek, Akta Otentik.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF POSITIONS THAT ALLEGEDLY MALPRACTICE NOTARY IN THE PROCESS OF AUTHENTIC DEED

Notary Public officials who are authorized by the State in making authentic deed. On this basis, we need a protection of the Law for Notaries when in fulfilling the task of his alleged malpractice in the process of making authentic act as stipulated in Article 66 paragraph (1) of Act No. 2 of 2014 regarding the amendment of Law No. 30 of 2004 job title, Notary (UUJN-P), there are no clear regulations on the position of Notary Honorary Council (MKN) and a form of protection MKN Law given to the Notary. Giving rise to legal problems, namely how the protection of the Law on Notary office alleged malpractice in the process of making authentic act and how the legal procedures for legal protection for Notary Public Notary by the Honorary Council (MKN) and during the Regional Supervisory Council (MPD).

Legal Protection to the positions of Notary during UUJN No 30 of 2004 that for the judicial process, investigators, prosecutors and judges with the approval of the MPD authorities to take a copy of Minuta Deed and or protocols Notary stored in the storage Noratis, while Law No. 2 of 2014 (UUJN-P) for the judicial process investigators, prosecutors and judges must obtain the consent of the Honorary Council Notaris. sedangkan to Procedures for Legal protection there are several steps that must be complied with by the investigators and the Honorary Council of Notaries in order to guarantee legal certainty and the protection of law found in article 66 paragraph (1) UUJN-P. It is by using a ratio of the authority of the Regional Supervisory Council (MPD) and the authority of Noratis Honorary Council (MKN).

Keywords: Protection Law, Notary, Alleged Malpractice, an authentic deed.